

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VI DPR RI
B I D A N G
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN,
INVESTASI, DAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

| | |
|------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2009-2010 |
| Masa Persidangan | : I |
| Rapat ke | : |
| Jenis Rapat | : Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari, tanggal | : Senin, 23 Nopember 2009 |
| W a k t u | : Pukul 14.00 s/d 17.00 WIB |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI |
| A c a r a | : 1. Pengantar Ketua Rapat; 2. Penjelasan Kepala BKPM atas pertanyaan tertulis Komisi VI DPR RI. 3. Tanya Jawab 4. Penutup |
| Ketua Rapat | : Ir. Nurdin Tambubolon , didampingi Ketua dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI (Ir. Airlangga Hartarto, MT, MBA, Aria Bima dan Ir. Agus Hermanto, MM.) |
| Sekretaris Rapat | : Wahyu Prameswari, SH, M.Si (Kabagset Komisi VI) |
| Hadir | : A. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal beserta jajarannya. B. 44 orang dari 51 orang Anggota. |

KESIMPULAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dibuka pada pukul 14.15 WIB.
2. Sebelum menyampaikan kata pengantar Ketua Rapat memperkenalkan Anggota Komisi VI DPR RI dan memberikan kesempatan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk memperkenalkan jajarannya.
3. Ketua Rapat menginformasikan bahwa Rapat Dengar Pendapat kali ini agenda utamanya adalah Pembahasan terhadap pencapaian target Program Kerja 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II Khususnya Badan Koordinasi Penanaman Modal.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menyampaikan penjelasan atas pertanyaan tertulis Komisi VI DPR RI.

5. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Komisi VI DPR RI untuk menanggapi atas penjelasan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

II. KESIMPULAN

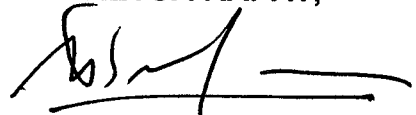
1. Komisi VI DPR RI meminta kepada Pemerintah cq Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar dapat mengimplementasikan salah satu program prioritas penyelesaian waktu untuk memulai usaha (*Starting a business*) dari 90 hari menjadi 10 hari, untuk PMA dan PMDN sebagai salah satu program prioritas 100 hari Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu II.
2. Dalam upaya mendorong masuknya investasi ke dalam negeri, Komisi VI DPR RI meminta BKPM agar berkoordinasi dengan berbagai lembaga pusat dan daerah guna menyusun kerangka implementasi pelaksanaan UU 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya terkait dengan Perumusan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang mencakup perbaikan iklim usaha, pola umum pemberian insentif, dan pengembangan bidang-bidang prioritas (pangan, infrastruktur dan energi)
3. Dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 6% sampai dengan 7% dibutuhkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) rata-rata Rp 2.000 triliun per tahun, sehubungan dengan hal tersebut Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah, cq BKPM agar berkoordinasi dengan Instansi terkait guna mengimplementasikan Investasi tersebut.
4. Komisi VI DPR menyambut baik penerbitan Perpres No 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi VI DPR RI meminta BKPM agar dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah di Provinsi dan Kabupaten di bidang Penanaman Modal.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat ditutup pada pukul 17.00 WIB.

Jakarta, 23 Nopember 2009

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**



Ir. NURDIN TAMPUBOLON

No. A-1